

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP TITIK SINGGUNG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING)**

**(Studi Putusan Pada PT Tanjungkarang No : 160/PID/2022/PT.TJK)**

**Oleh**  
**MUHAMMAD FADHLI FARID**

Dalam suatu perkara jual-beli sering terjadi permasalahan antara kedua belah pihak atau lebih yang terikat perjanjian jual-beli. Permasalahan yang terjadi bisa terjadi karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau salah satu pihak lain tidak mendapatkan haknya. Permasalahan keperdataan ini disebut dengan wanprestasi (ingkar janji). Tetapi tidak sedikit permasalahan keperdataan yang dipidanakan karena ketidakpastian penerapan hukum yang dipakai. terutama dalam kasus penggelapan dalam kasus jual-beli. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji mengenai kasus, yaitu kasus jual-beli yang wanprestasi, tetapi dituntut dan diputus pidana di pengadilan tingkat pertama, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tanjung karang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus hukum (*legal case study*). Sumber data yang diperoleh yaitu data Sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa apabila dalam suatu kasus jual beli, titik singgung dalam hukum perdata dan hukum pidana terdapat pada sisi adanya perjanjian yang mengikat kedua pihak. Dalam penelitian ini terdakwa tidak dapat memenuhi prestasinya kepada penjual yang sudah disepakati dan pada akhirnya Jual-Beli bahan-bahan bangunan yang dilakukan terdakwa dengan penjual dalam putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan. Namun dalam putusan pengadilan tingkat banding dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena hutang-piutang tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

***Muhammad Fadhl Farid***

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa titik singgung antara sengketa perdata dengan sengketa pidana masih sering menjadi perdebatan. Meskipun keduanya masih sama-sama dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, namun terkadang sulit memisahkan kualifikasi antara keduanya. Selain itu, tolak ukur hakim mempertimbangkan aspek keperdataan dalam suatu perkara pidana ialah melihat implikasi kerugian yang timbul yang berujung ditemukannya karakteristik sengketa pada perkara tersebut.

**Kata kunci:** Hukum Perdata, Hukum Pidana, Titik Singgung, dan Putusan  
*Onslag van alle rechtvervolging.*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE POINTS OF CONTACT OF CRIMINAL LAW AND CIVIL LAW IN ANY DECISIONS FROM ALL LEGAL CLAIMS (Verdict**

**Study at PT Tanjungkarang No. 160/PID/2022/PT TJK)**

**By :**

**MUHAMMAD FADHLI FARID**

In a buying and selling case, problems often occur between two or more parties who are bound by a sale and purchase agreement. Problems that occur can occur because one party cannot fulfill its obligations or one of the other parties does not get its rights. This civil problem is called default (broken promise). But there are not a few civil cases that are criminalized because of the uncertainty of the application of the law used. especially in cases of embezzlement in cases of buying and selling. The problem in this study examines cases, namely buying and selling cases that were in default, but were prosecuted and convicted at the court of first instance, and the decision was released from all lawsuits at the appeal level at the Tanjung Karang High Court.

This research uses a type of normative research with a case approach and statutory approach. The type of research used in this research is descriptive research. The problem approach used in this research is a legal case study. The data source obtained is secondary data.

The results of this study show that in a sale and purchase case, the point of contact in civil law and criminal law is on the side of an agreement that binds the two parties. In this study the defendant was unable to fulfill his achievements with the agreed seller and in the end the buying and selling of building materials carried out by the defendant and the seller in a court decision of first instance was declared legally and convincingly proven guilty of committing the crime of embezzlement. However, in the decision of the appellate court it was stated that the defendant was proven to have committed an act but it was not a crime. Therefore, the defendant was acquitted of all lawsuits because the debts cannot be declared a crime.

***Muhammad Fadhl Farid***

The conclusion from this study is that the point of contact between civil disputes and criminal disputes is still often debated. Even though both are still considered as actions that harm other people, sometimes it is difficult to separate the qualifications between the two. In addition, the benchmark for judges considering civil aspects in a criminal case is to look at the implications of the losses that arise which lead to the discovery of the characteristics of the dispute in the case.

**Keywords:** Civil Law, Criminal Law, Tangents, and Decisions *Onslag van alle rechtvervolging.*